

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala potensi, keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia juga mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berdaya saing. Sumber daya manusia merupakan aset yang berharga bagi organisasi, karena dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang baik menjadi hal yang penting bagi organisasi. Menurut (Sulistiyowati, 2021) Sumber daya manusia adalah individu yang dipekerjakan oleh suatu instansi untuk menggerakkan, memikirkan, dan merencanakan kegiatan organisasi demi mencapai tujuannya.

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam sumber daya manusia adalah faktor kinerja, kinerja merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan atau instansi dalam mencapai tujuannya, karena semakin baik kinerja pegawainya maka semakin baik pula perusahaan atau instansi tersebut. Tanpa tanpa kinerja yang baik sulit bagi perusahaan atau instansi untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga kinerja pegawai menjadi salah satu faktor kesuksesan perusahaan dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Instansi pemerintahan adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Instansi pemerintahan terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Pemerintah pusat merupakan pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dalam tingkat nasional. Instansi pemerintahan yang berada di tingkat pusat meliputi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan badan usaha milik negara (BUMN).

Pemerintah daerah merupakan pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dalam tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa. jadi Instansi pemerintahan yang berada di tingkat daerah meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dalam tingkat desa. Instansi pemerintahan yang berada di tingkat desa meliputi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD). Secara umum, tugas dan fungsi instansi pemerintahan ialah. Melaksanakan tugas pemerintahan, Melaksanakan pembangunan. dan Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Desa mempunyai tugas diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara jalannya roda pemerintahan dengan mengindahkan unsur perlindungan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Kuningan memiliki 32 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Cimahi. Kecamatan Cimahi merupakan pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dalam tingkat kecamatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Cimahi membawahi 10 desa. Berikut data 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan dan desa-desa di Kecamatan Cimahi. di sajikan dalam bentuk tabel 1.1 Tabel Kecamatan di Kabupaten Kuningan dan 1.2 Tabel desa – desa Kecamatan Cimahi.

Tabel 1.1 Kecamatan Di Kabupaten Kuningan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Provinsi
1	Kecamatan Kuningan	16	Jawa Barat
2	Kecamatan Kramatmulya	14	Jawa Barat
3	Kecamatan Ciniru	9	Jawa Barat
4	Kecamatan Hantara	8	Jawa Barat
5	Kecamatan Cigugur	10	Jawa Barat
6	Kecamatan Luragung	16	Jawa Barat
7	Kecamatan Cimahi	10	Jawa Barat
8	Kecamatan Cibingbin	10	Jawa Barat
9	Kecamatan Cibeureum	8	Jawa Barat
10	Kecamatan Ciwaru	12	Jawa Barat
11	Kecamatan Karangkencana	9	Jawa Barat
12	Kecamatan Garawangi	17	Jawa Barat
13	Kecamatan Maleber	16	Jawa Barat

14	Kecamatan Cidahu	12	Jawa Barat
15	Kecamatan Kalimanggis	6	Jawa Barat
16	Kecamatan Ciawigebang	24	Jawa Barat
17	Kecamatan Cipicung	10	Jawa Barat
18	Kecamatan Sindangagung	12	Jawa Barat
19	Kecamatan Lebakwangi	13	Jawa Barat
20	Kecamatan Darma	19	Jawa Barat
21	Kecamatan Cilimus	13	Jawa Barat
22	Kecamatan Cigandamekar	11	Jawa Barat
23	Kecamatan Jalaksana	15	Jawa Barat
24	Kecamatan Japara	10	Jawa Barat
25	Kecamatan Mandirancan	12	Jawa Barat
26	Kecamatan Pancalang	13	Jawa Barat
27	Kecamatan Pasawahan	10	Jawa Barat
28	Kecamatan Kadugede	12	Jawa Barat
29	Kecamatan Nusaherang	8	Jawa Barat
30	Kecamatan Selajambe	7	Jawa Barat
31	Kecamatan Subang	7	Jawa Barat
32	Kecamatan cilebak	7	Jawa Barat

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan

Dari tabel di atas dapat di lihat Kabupaten Kuningan membawahi 32 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 376 desa, dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan salah satunya yaitu Kecamatan Cimahi dengan membawahi desa sebanyak 10 desa.

Tabel 1.2 Desa Di Kecamatan Cimahi

Nama Desa	Jumlah Perangkat	Jumlah Penduduk
Cikeusal	11	4.417
Cileuya	12	5.562
Cimahi	9	2.783
Cimulya	9	1.634
Gunungsari	10	2.549
Kananga	11	2.656
Margamukti	11	5.032
Mekarjaya	12	3.009
Mulyajaya	8	2.220
Sukajaya	8	2.586

Sumber : Pemerintahan desa Kecamatan Cimahi

Pemerintahan desa kecamatan cimahi memiliki 101 orang perangkat desa yang terdiri dari. Sekertaris desa yang berjumlah 10 orang. Kepala urusan tata usaha

berjumlah 10 orang. Kepala urusan keuangan berjumlah 10 orang. Kepala urusan perencanaan berjumlah 10 orang. Kepala seksi pemerintahan berjumlah 10. Kepala seksi kesejahteraan 10 orang. Kepala seksi pelayanan 10 orang. Kepala dusun 31 orang. Perangkat desa memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa, perangkat desa sebagai sarana pendukung Pemerintah untuk melayani kepentingan publik. Kinerja perangkat desa memiliki pengaruh yang sangat besar, maka untuk itu pemerintahan desa kecamatan cimahi harus didukung dengan kinerja perangkat desa yang baik pada setiap perangkat desanya. Keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Desa dalam pelayanan publik kepada masyarakat desa sangat ditentukan dari kinerja perangkat Desa itu sendiri. Perangkat desa sebagai birokrasi di tuntut untuk dapat memberikan kualitas pelayanan umum yang baik yang sesuai dengan prosedur dan perangkat desa harus mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, cekatan, efektif, dan efisien, terutama dalam pelaksanaan pelayanan pada bagian administrasi.

Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 dan 23 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 - 2015 terdapat pada Bab XIII bagian kesatu tentang Pelayanan Publik dan asas Penyelenggarannya adalah Pemerintahan Desa wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kinerja perangkat desa harus sesuai dengan pedoman yaitu konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat untuk mengelola dan menangani urusan desa. Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik terutama di desa, seperti administrasi kependudukan yang meliputi: pembuatan KTP, pembuatan BPJS, pengurusan surat keterangan lahir, pengurusan perubahan data kartu keluarga, pengurusan surat tanah.

Hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan kepada 30 masyarakat desa kecamatan cimahi tentang pelayanan perangkat desa cimahi, ada beberapa kendala atau masalah yang terjadi seperti saat masyarakat melakukan pengurusan di kantor desa yaitu.

Tabel 1.3 Pra Survey Masyarakat Kecamatan Cimahi

Pertanyaan	Jawaban (%)		Jumlah responden
	Ya	Tidak	
Apakah Anda pernah mengalami pembuatan KTP di kantor Desa memakan waktu lebih lama dari batas waktu yang dijanjikan?	73,3%	26,6%	30
Apakah dalam proses pengajuan berkas-berkas untuk pembuatan surat-surat membutuhkan waktu yang lama?	40%	60%	30
Pernahkah Anda menunggu atau melakukan pengurusan pembuatan surat-surat di lain hari karena perangkat desa tidak ada di tempat?	46,6%	53,3%	30
Apakah dalam proses pembuatan kartu BPJS di kantor Desa memakan waktu lebih lama dari batas waktu yang telah dijanjikan?	66,6%	33,3%	30

Sumber : Pra Survey Masyarakat Kecamatan Cimahi

Hasil pra survey awal yang telah peneliti lakukan kepada 30 masyarakat desa kecamatan cimahi yang menggunakan pelayanan kantor desa secara keseluruhan masyarakat belum merasa puas akan pelayanan yang di berikan dimana dari hasil pra survey yang telah peneliti lakukan diperoleh 73,3% masyarakat desa kecamatan cimahi yang menggunakan pelayanan kantor desa menjawab pembuatan KTP memakan waktu lebih lama dari batas waktu yang dijanjikan, sedangkan KTP merupakan kartu tanda penduduk yang sangat penting yang wajib di miliki setiap warga negara. 40% masyarakat desa kecamatan cimahi yang menggunakan pelayanan kantor desa menjawab dalam proses pengajuan berkas-berkas untuk pembuatan surat-surat membutuhkan waktu yang lama. 46,6% masyarakat desa kecamatan cimahi yang menggunakan pelayanan kantor desa menjawab mereka selalu menunggu atau melakukan pengurusan pembuatan surat-surat di lain hari

karena perangkat desa tidak ada di tempat. 66,6% masyarakat desa kecamatan cimahi yang menggunakan pelayanan kantor desa menjawab pembuatan kartu BPJS memakan waktu lebih lama dari batas waktu yang telah dijanjikan sedangkan BPJS merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu karena BPJS dapat membantu meringankan biaya pengobatan.

Maka dapat di simpulkan bahwa kinerja perangkat desa kecamatan cimahi belum maksimal. di karenakan pelayanan yang di berikan perangkat desa kecamatan cimahi tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat desa kecamatan cimahi yang menggunakan pelayanan kantor desa.

Sedangkan Kinerja perangkat desa harus sesuai dengan pedoman yaitu konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat untuk mengelola dan menangani urusa desa. Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik terutama di desa. Bukan hanya dalam administratif pada saat observasi di lakukan terlihat perangkat desa yang banyak santai, bermain hp, dan mengobrol di saat jam kerja berlangsung.

Kinerja merupakan hal penting yang harus di capai oleh setiap instansi termasuk pemerintahan desa Kecamatan Cimahi karena kinerja merupakan cerminan bagi kemampuan instansi dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdaya manusia, oleh karena itu kinerja para perangkat merupakan salah satu faktor penentu bagi berlangsungnya kegiatan instansi dan berpengaruh bagi proses pencapaian tujuan instansi (Andayani & Tirtayasa, 2019).

Untuk memperoleh kinerja yang maksimal instansi atau organisasi perlu memperhatikan beberapa faktor penting yang mempengaruhi kinerja. (Mangkunegara, 2017), kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut (Kasmir, 2019), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu keterampilan dan pengetahuan khusus,

pengetahuan, desain pekerjaan, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, iklim kerja, loyalitas, komitmen. dan disiplin pekerjaan.

Kepemimpinan merupakan salah satu indikator yang sangat berpengaruh terhadap kinerja, Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang yang tidak semua orang bisa untuk melakukannya. Seorang pemimpin bisa mengendalikan, mengawasi, mengarahkan para bawahannya untuk mencapai tujuan dari pemimpin itu sendiri maupun tujuan dari perusahaan. Seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab atas tercapainya tujuan tersebut bagaimana seorang pemimpin mengarahkan bawahannya demi mencapai tujuan tersebut agar mencapai hasil yang maksimal dan tanpa adanya hambatan. Kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mengatur karyawannya atau bawahannya. Kepemimpinan yang baik dapat mengendalikan dan mengawasi karyawan sehingga dapat menjalankan segala intruksi yang telah diberikan. Pemimpin yang efektif dapat berpikir cepat, serta memiliki karakter yang dapat mendorong karyawan agar dapat mengikuti semua arahan yang telah diberikan kepadanya (Mango, 2018). Kepemimpinan yang baik dapat mendorong untuk bekerja lebih keras dan lebih produktif. Penelitian yang di lakukan oleh (Netti, 2023) Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh (Saputri, 2018). Menunjukkan kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.

Budaya organisasi merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya organisasi yang positif dan kondusif akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung untuk bekerja dengan baik. Kinerja yang buruk dan motivasi yang rendah dapat disebabkan oleh budaya organisasi yang kurang baik. Termasuk kesadaran untuk meningkatkan kinerja, akan sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Memahami internalisasi budaya organisasi. merupakan salah satu faktor kunci dalam mempengaruhi perilaku perangkat desa dan meningkatkan kinerja mereka. Hal ini dikarenakan kesadaran akan pentingnya budaya organisasi. tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jika nilai-nilai perangkat desa selaras dengan nilai-

nilai organisasi, mereka akan lebih puas dan loyal. Untuk mendorong kinerja yang produktif, budaya organisasi yang mendukung sangatlah penting dalam pembentukan kinerja (Safitri, 2018). Penelitian yang di lakukan oleh (Netti, 2023). Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Akan tetapi berdeda dengan penelitian yang di lakukan oleh (Nurhalim et al., 2015). Budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja.

Selain Kepemimpinan dan Budaya organisasi, kinerja tidak terlepas dari pengaruh etos kerja. Hal ini selaras dengan pendapat (Priansa, 2018) yang mengemukakan bahwa etos kerja merupakan seperangkat sikap atau pandangan mendasar yang dipegang perangkat desa untuk menilai bekerja sebagai suatu hal yang positif bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilaku kerjanya dalam organisasi. Terlihat dari beberapa perangkat desa yang sering santai dan mengobrol di jam kerja dan mengabaikan pekerjaan, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya etos kerja terhadap disiplin dalam bekerja, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam bekerja. Etos kerja yang baik akan mendorong seseorang untuk bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, dan komitmen. Penelitian yang di lakukan oleh (Hakim et al., 2022). Secara parsial etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Akan tetapi berdeda dengan penelitian yang di lakukan oleh (Nuruzzaman, 2023). Etos kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Netti, 2023). Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Penelitian yang di lakukan oleh (Netti, 2023). Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Dan penelitian yang di lakukan oleh (Hakim et al., 2022). secara parsial etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Akan tetapi hasil berbeda di temukan dalam penelitian (Saputri, 2018) menunjukkan kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja. Penelitian (Nurhalim et al., 2015) menunjukan Budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja. Dan Penelitian yang di lakukan oleh (Nuruzzaman, 2023) Etos kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Berdasarkan data serta uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada pemerintahan desa kecamatan cimahi yang berjudul : **“Pengaruh Kepemimpinan Budaya Organisasi Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Kecamatan Cimahi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan seagai berikut :

1. Apakah Pengaruh Kepemimpinan Budaya Organisasi Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Kecamatan Cimahi ?
2. Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Perangkat Desa Kecamatan Cimahi?
3. Bagaimana Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Desa Kecamatan Cimahi?
4. Bagaimana Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Kecamatan Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Budaya Organisasi Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Desa Kecamatan Cimahi
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Perangkat desa Desa Kecamatan Cimahi
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat desa Desa Kecamatan Cimahi
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja Perangkat desa Desa Kecamatan Cimahi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, yang terutama dalam hubungan dengan manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan Pengaruh kepemimpinan budaya organisasi dan etos kerja terhadap kinerja pegawai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Pemerintahan Desa Kecamatan Cimahi

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan gambaran bagi Pemerintahan Desa Kecamatan Cimahi dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai melalui kepemimpinan budaya organisasi dan etos kerja terhadap kinerja pegawai sehingga dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Desa Kecamatan Cimahi.

b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat menjadi bahan rujukan, bahan informasi serta sumber referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan.